

EVALUASI MANAJEMEN PILKADA KOTA METRO DI ERA PANDEMI COVID-19

Nurris Septa Pratama¹, Bambang Suhada², Febriyanto³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Metro, Kota Metro, 34111, Indonesia

Email: nurrissept8@gmail.com¹

basucpc@gmail.com²

febriyanto0223027901@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui struktur realitas permasalahan yang dihadapi oleh aparaturnya KPU Kota Metro dalam manajemen Pilkada Kota Metro yang dilaksanakan oleh KPU Kota Metro tahun 2020; 2) Untuk mengetahui format perencanaan, koordinasi, implementasi dan pengawasan eksisting dalam setiap tahapan Pilkada Kota Metro tahun 2020; 3) Untuk mengetahui model manajemen pelaksanaan Pilkada Kota Metro yang dilaksanakan oleh KPU Kota Metro tahun 2020 agar dihasilkan Pilkada yang berkualitas. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Pendekatan *Fishbone Ishikawa* dan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Hasil penelitian menunjukkan Faktor atau Kriteria yang dianggap paling penting dalam Evaluasi Manajemen Pilkada Kota Metro adalah Partisipasi Pemilih yang sangat berpengaruh, sedangkan kriteria sistem informasi menjadi kriteria yang dianggap paling tidak penting dan berpengaruh karena tidak banyak berdampak pada pelaksanaan Pilkada Kota Metro.

Kata kunci: Manajemen, Pilkada, Pandemi Covid-19

Abstract

This study aims to: 1) To find out the reality structure of the problems faced by Metro City KPU officials in the management of the Metro City Pilkada carried out by the Metro City KPU in 2020; 2) To find out the existing planning, coordination, implementation and supervision formats in each stage of the 2020 Metro City Pilkada; 3) To find out the management model for the implementation of the Metro City Pilkada carried out by the Metro City Election Commission in 2020 so that quality Pilkada are produced. The data analysis technique used in this study is the Fishbone Ishikawa Approach Analysis and the Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of the study show that the factor or criterion that is considered the most important in the Management Evaluation of the Metro City Pilkada is Voter Participation which is very influential, while the information system criterion is the criterion that is considered the least important and influential because it does not have much impact on the implementation of the Metro City Pilkada.

Keywords: Management, Regional Elections, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana untuk memilih Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga kedudukannya dalam pemerintahan menjadi terlegitimasi (*legitimated*). Pemilihan kepala daerah di tahun 2020 digelar secara serentak diseluruh Indonesia untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia yang diikuti oleh 270 daerah dengan rincian pemilihan untuk tingkat propinsi sebanyak 9 propinsi, tingkat kabupaten sebanyak 224 kabupaten dan tingkat kota sebanyak 37 Kota.

Manajemen pelaksanaan pemilihan sangat terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemandirian penyelenggara pemilihan merupakan prinsip utama agar pemilihan memiliki legitimasi dan kredibilitas. Mandat konstitusi menyatakan bahwa pemilihan diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Mandat ini harus diterjemahkan dalam tataran pengetahuan dan ketrampilan yang lebih operasional sehingga KPU dapat lebih efektif dan responsif dalam melayani hak konstitusional warga negara.

Penerapan manajemen pelaksanaan pemilihan menjadi penting bagi KPU yang akan melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala

daerah. Manajemen pemilihan akan mengatur hal-hal yang rumit, kompleks dan politis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada suatu daerah, khususnya kota Metro. Manajemen pelaksanaan pemilihan memuat perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian pada tahapan pilkada 2020 dilingkungan KPU kota metro, Peraturan Perundangan-undangan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan terencana dan terorganisir yang dimulai dari pendaftaran pemilih dan peserta, pemungutan suara dan sampai penghitungan suara dilakukan.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen

George R. Terry, (1997) menyatakan pengertian manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi inilah yang kemudian dikenal dengan fungsi manajemen.

Peter Drucker dalam bukunya Said (2017:5) Manajemen dikategorikan sebagai sebuah profesi seperti halnya profesi kedokteran atau akuntan yang membutuhkan keahlian, alat, metode dan talenta tertentu, serta yang lebih penting perlu dipraktikkan di lapangan.

Davidson, dkk dalam bukunya Said (2017:6) Manajemen adalah sekumpulan aktivitas untuk menggerakkan sumber daya dalam organisasi yaitu *human resources*, *financial resources*, *physical resources* dan *information resources* guna mencapai tujuan organisasi dengan efektif

dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi.

Mary Parker Follett dalam bukunya Said (2017:4) Manajemen sebagai *"the art of getting done through people"*. Manajemen sebagai seni untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dengan menggunakan seni dalam memimpin untuk mempengaruhi orang lain.

Berdasarkan pemaparan para pakar manajemen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah, seni, keahlian dan pengalaman dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Evaluasi

Evaluasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *"Evaluation"* yang berarti sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Worthen dan Sanders (1973) dalam Arikunto (2010:1) evaluasi merupakan kegiatan mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2010:2), evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang

bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Selanjutnya Mohammad Ali (2014) mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan.

Sedangkan menurut Stanley and Hopskin (1978) dalam Mohammad Ali (2014) evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat penilaian tentang nilai sesuatu. Menurut Sugiyono (2015) evaluasi adalah proses untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program tercapai.

Berdasarkan beberapa pendapat dan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi yang berguna untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu program termasuk dari perencanaan, implementasi hingga hasil suatu program atau kebijakan. Jika sebuah program yang sudah berjalan tidak dilakukan evaluasi, bagaimana dengan ketercapaian tujuan program, dan bagaimana keefektifan program tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 35 Manullang, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan, Jakarta, 1983, hlm. 31. 29 2005 adalah: "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU No.22 Tahun 2007, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

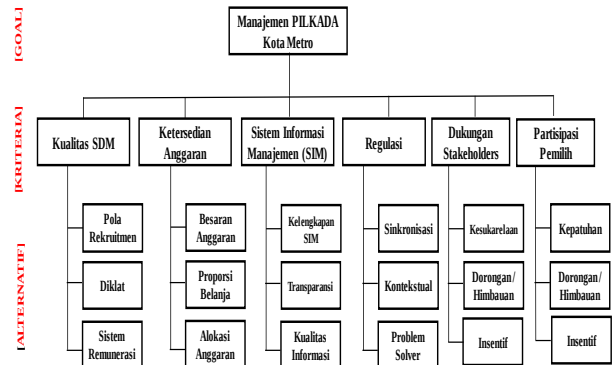
Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) sebagai lembaga kesehatan dunia mengeluarkan pernyataan resmi terkait pandemi COVID-19 sebagai pandemi global. Virus COVID-19 (disebut juga SARS-CoV-2) adalah virus baru pada manusia. Kemungkinan hewan sumber COVID-19 saat ini belum dipastikan tetapi penelitian sedang berlangsung. WHO terus memantau penelitian terbaru tentang ini dan topik COVID-19 lainnya serta akan memberikan pemutakhiran jika temuan baru tersedia.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini penulis sajikan melalui gambar 1 berikut:

Gambar 1: Kerangka Berpikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah campuran yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pendekatan Fishbone Ishikawa

Analisis pendekatan Fishbone Ishikawa yaitu Suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dankesenjangan yang ada (Gaspers, V. 2002.)

Analysis Fishbone dapat berfungsi sebagai pengidentifikasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu spesifik masalah dan kemudian memisahkan akar penyebabnya, memungkinkan juga untuk mengidentifikasi solusi yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut (bisa lebih dari satu masalah), langkah-langkah untuk melakukan Analysis Fishbone adalah sebagai berikut:

- a. Mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama yang penting dan mendesak terlebih dahulu.
 - b. Menuliskan masalah tersebut pada bagian kepala ikan yang merupakan penyebab utama masalah tersebut bisa terjadi.
 - c. Tulis pada sisi sebelah kanan dari kertas (kepala ikan), kemudian gambarkan tulang belakang dari kiri ke kanan dan tempatkan pernyataan masalah itu dalam kotak.
 - d. Tuliskan faktor-faktor penyebab utama (sebab-sebab) yang mempengaruhi masalah kualitas sebagai tulang besar, juga ditempatkan dalam kotak. Faktor-faktor penyebab atau kategori-kategori utama dapat dikembangkan melalui Stratifikasi ke dalam pengelompokan dari faktor-faktor: manusia, mesin, peralatan, material, metode kerja.
2. Analytical Hierarchy Process (AHP)
- Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki

sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis (Syaifullah, 2010).

Analytical Hierarchy Process (AHP) sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam.
- b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
- c. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

Saaty (2008) menjelaskan bahwa cara perhitungan metode AHP sebagai berikut:

1. Tetapkan kriteria.
2. Tentukan nilai kriteria dengan perbandingan berpasangan skala 1-9. Data yang sudah didapat disusun menjadi matriks.
3. Hitung Total Nilai pada masing-masing kolom matriks.
4. Bagi masing-masing nilai dari kolom dengan nilai total kolom masing-masing hingga didapat data normalisasi.
5. Hitung total nilai dari masing-masing baris lalu bagi pada jumlah elemen untuk memperoleh nilai rata-rata yang merupakan data prioritas per kriteria
6. Kali masing-masing nilai di kolom satu dengan nilai prioritas elemen satu, nilai di kolom dua dengan nilai prioritas elemen dua, sampai selesai.

7. Hitung total nilai masing-masing baris
8. Bagi Nilai total baris dengan Nilai prioritas relatif masing-masing.
9. Tambah hasil perhitungan tersebut diatas dengan jumlah elemen sehingga didapat λ maks
10. Hitung Indeks Konsistensi (CI) dengan rumus : $CI = (\lambda \text{ maks} - n) / n - 1$, n merupakan jumlah elemen.
11. Hitung Rasio Konsistensi (CR) dengan rumus : $CR = CI/IR$, dengan IR merupakan Indeks Random Consistency yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Daftar Indeks Random Consistency (IR)

Ukuran Matriks	1,2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nilai IR	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51	1.48	1.56	1.5

Sumber: Saaty, 2008

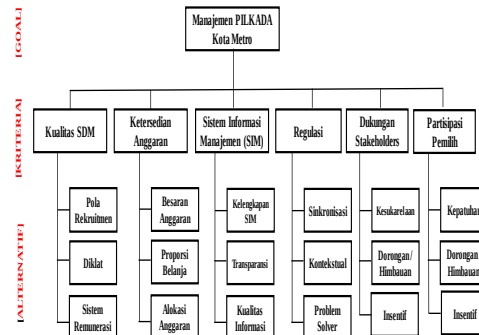
12. Cek konsistensi hierarki. Jika hasil lebih dari 10% , maka harus diperbaiki. Jika rasio (CI/IR) kurang dari sama dengan 0,1 maka hasil perhitungan dinyatakan konsisten.

Data kriteria yang akan digunakan Sesuai hasil konsultasi dan validasi oleh KPU Kota Metro adalah Sebagai berikut:

1. Kualitas SDM
2. Ketersediaan Anggaran
3. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
4. Regulasi
5. Dukungan Stakeholders
6. Partisipasi Pemilih

Sehingga didapat hierarki dalam penelitian ini sesuai gambar 2 berikut:

Gambar 2: Hierarki Evaluasi Manajemen Pilkada Kota Metro



HASIL PENELITIAN

1. Pembobotan Kriteria

Kriteria yang telah ditentukan dibuat dalam matriks perbandingan *pairwise* dengan memberikan pertanyaan tertutup kepada responden. Selanjutnya disajikan pada tabel penjumlahan kolom matriks berdasarkan kriteria pada tabel 3 lalu disederhanakan pada tabel 4 berikut:

Tabel 3: Matriks Faktor Pembobotan Kriteria

Penjumlahan Kolom Matrik Berdasarkan Kriteria Utama						
KRITERIA	Kualitas SDM	Ketersediaan anggaran	SIM	Regulasi	Dukungan Stakholder	Partisipasi pemilih
Kualitas SDM	1,00	3,22	2,18	2,06	1,31	0,48
Ketersediaan anggaran	0,31	1,00	1,76	1,84	0,27	0,28
SIM	0,46	0,57	1,00	0,36	0,48	0,43
Regulasi	0,46	0,54	2,79	1,00	2,88	0,43
Dukungan stakholder	0,77	3,73	2,06	0,35	1,00	0,25
Partisipasi pemilih	2,06	3,56	2,33	2,31	3,98	1,00
TOTAL	5,05	12,62	12,12	7,92	9,92	2,88

Sumber: Data diolah, 2023

Setelah didapat matriks pada tabel 3 tersebut, selanjutnya dibuat matriks normalisasi dengan membagi nilai pada tiap kolom dibagi dengan nilai total kolom sebagaimana tabel 4 berikut:

Tabel 4: Normalisasi Matriks Kriteria

Normalisasi Matriks Berdasarkan Kriteria Utama							
KRITERIA	Kualitas SDM	Ketersediaan anggaran	SIM	Regulasi	Dukungan Stakholder	Partisipasi Pemilih	Rata-Rata
Kualitas SDM	0,20	0,26	0,18	0,26	0,13	0,17	0,20
Ketersediaan anggaran	0,06	0,08	0,15	0,23	0,03	0,10	0,11
SIM	0,09	0,05	0,08	0,05	0,05	0,15	0,08
Regulasi	0,09	0,04	0,23	0,13	0,29	0,15	0,16
Dukungan stakholder	0,15	0,30	0,17	0,04	0,10	0,09	0,14
Partisipasi pemilih	0,41	0,28	0,19	0,29	0,40	0,35	0,32

Sumber: Data diolah, 2023

Setelah mendapat eigen vector, matriks perbandingan semula dikalikan dengan matriks pada nilai rata-rata. Sehingga:

$$\begin{bmatrix} 1,00 & 3,22 & 2,18 & 2,06 & 1,31 & 0,48 \\ 0,31 & 1,00 & 1,76 & 1,84 & 0,27 & 0,28 \\ 0,46 & 0,57 & 1,00 & 0,36 & 0,48 & 0,43 \\ 0,46 & 0,54 & 2,79 & 1,00 & 2,88 & 0,43 \\ 0,77 & 3,73 & 2,06 & 0,35 & 1,00 & 0,25 \\ 2,06 & 3,56 & 2,33 & 2,31 & 3,98 & 1,00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,20 \\ 0,11 \\ 0,08 \\ 0,16 \\ 0,14 \\ 0,32 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0,20 & 0,35 & 0,17 & 0,31 & 0,18 & 0,15 \\ 0,06 & 0,11 & 0,14 & 0,28 & 0,04 & 0,09 \\ 0,09 & 0,06 & 0,08 & 0,05 & 0,07 & 0,14 \\ 0,09 & 0,06 & 0,22 & 0,15 & 0,40 & 0,14 \\ 0,15 & 0,41 & 0,16 & 0,05 & 0,14 & 0,08 \\ 0,41 & 0,39 & 0,21 & 0,35 & 0,56 & 0,32 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0,20 & 0,35 & 0,17 & 0,31 & 0,18 & 0,15 \\ 0,06 & 0,11 & 0,14 & 0,28 & 0,04 & 0,09 \\ 0,09 & 0,06 & 0,08 & 0,05 & 0,07 & 0,14 \\ 0,09 & 0,06 & 0,22 & 0,15 & 0,40 & 0,14 \\ 0,15 & 0,41 & 0,16 & 0,05 & 0,14 & 0,08 \\ 0,41 & 0,39 & 0,21 & 0,35 & 0,56 & 0,32 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5,42 \\ 2,64 \\ 0,29 \\ 3,26 \\ 0,25 \\ 0,85 \end{bmatrix} / \begin{bmatrix} 0,20 \\ 0,11 \\ 0,08 \\ 0,16 \\ 0,14 \\ 0,32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5,78 \\ 6,52 \\ 6,20 \\ 7,28 \\ 6,72 \\ 7,11 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya untuk menguji konsistensi hierarki, dilakukan penghitungan Consistency Index (CI) lanjut dengan penghitungan Rasio Konsistensi/ *Consistency Ratio* (CR)

$$CI = (\lambda \text{ maks} - n) / (n - 1) \\ = ((5,78 + 6,52 + 6,20 + 7,28 + 6,72 + 7,11) / 6) - 6) / (6 - 1) \\ = (6,60 - 6) / (6 - 1) \\ = 0,12$$

$$CR = CI / IR \\ = 0,12 / 1,24 \\ = 0,09$$

Karena $CR \leq 0,1$ berarti preferensi responden adalah konsisten. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas berikut:

1. Kualitas SDM dengan bobot 0,20 atau 20%,
2. Ketersediaan anggaran dengan bobot 0,11 atau 11%
3. Sistem Informasi manajemen dengan bobot 0,08 atau 8%
4. Regulasi dengan bobot 0,16 atau 16%
5. Dukungan stakeholders dengan bobot 0,14 atau 14%
6. Partisipasi pemilih dengan bobot 0,32 atau 32%

Selanjutnya dilakukan perhitungan vektor prioritas dengan mengalikan baris pada Tabel 8 kemudian ditarik akar pangkat n dengan n adalah jumlah kriteria. Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 4 (2023) No. 2
ISSN Cetak 2746-5551
ISSN Online 2746-556X

Hasil setiap baris dibagi dengan jumlah dari hasil semua baris. Dengan demikian dapat diperoleh vektor prioritasnya, yaitu:

$$\sqrt[6]{1 \times 0,31 \times 0,46 \times 0,46 \times 0,77 \times 2,06} = 1,280 \quad (1)$$

$$\sqrt[6]{3,22 \times 1 \times 0,57 \times 0,54 \times 3,73 \times 3,56} = 0,751 \quad (2)$$

$$\sqrt[6]{2,18 \times 1,76 \times 1 \times 2,79 \times 2,06 \times 2,33} = 0,645 \quad (3)$$

$$\sqrt[6]{2,06 \times 1,84 \times 0,36 \times 1 \times 0,35 \times 2,31} = 0,984 \quad (4)$$

$$\sqrt[6]{1,31 \times 0,27 \times 0,48 \times 2,88 \times 1 \times 3,98} = 0,929 \quad (5)$$

$$\sqrt[6]{0,48 \times 0,28 \times 0,43 \times 0,43 \times 0,25 \times 1} = 1,754 \quad (6)$$

$$\Sigma = 6,342$$

Setelah didapat persamaan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dilanjutkan membagi hasil persamaan dengan jumlah total sebagai berikut:

Vektor Prioritas:

$$1,280 : 6,342 = 0,202$$

$$0,751 : 6,342 = 0,118$$

$$0,645 : 6,342 = 0,102$$

$$0,984 : 6,342 = 0,155$$

$$0,929 : 6,342 = 0,146$$

$$1,754 : 6,342 = 0,277$$

2. Pembobotan Alternatif

a. Alternatif pada Kualitas SDM

Analisis alternatif dari kriteria kualitas SDM yang diambil dari pertanyaan tertutup, kemudian disajikan pada tabel penjumlahan kolom matriks pada tabel 6 dan 7 berikut:

Tabel 6: Matriks Faktor Pembobotan Alternatif Kriteria Kualitas SDM

Penjumlahan Kolom Matriks Berdasarkan Alternatif Kualitas SDM			
KRITERIA	Pola Rekrutmen	Diklat	Sistem Remunerasi
Pola Rekrutmen	1,00	0,58	0,52
Diklat	1,71	1,00	1,81
Sistem Remunerasi	2,18	0,55	1,00
TOTAL	4,89	2,17	3,33

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 7: Normalisasi Matriks Alternatif Pada Kriteria Kualitas SDM

Penjumlahan Kolom Matriks Berdasarkan Alternatif Kualitas SDM				
KRITERIA	Pola Rekrutmen	Diklat	Sistem Remunerasi	Rata-Rata
Pola Rekrutmen	0,20	0,27	0,16	0,21
Diklat	0,35	0,47	0,54	0,45
Sistem Remunerasi	0,45	0,26	0,30	0,34
Eigen Vector				1,00

Sumber : Data diolah, 2023

Setelah mendapat eigen vector, matriks perbandingan awal dikali matriks pada nilai rata-rata. Sehingga:

$$\begin{bmatrix} 1,00 & 0,58 & 0,52 \\ 1,71 & 1,00 & 1,81 \\ 2,18 & 0,55 & 1,00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,21 \\ 0,45 \\ 0,34 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0,21 & 0,26 & 0,18 \\ 0,36 & 0,45 & 0,62 \\ 0,46 & 0,25 & 0,34 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0,21 & 0,26 & 0,18 \\ 0,36 & 0,45 & 0,62 \\ 0,46 & 0,25 & 0,34 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,65 \\ 1,42 \\ 1,05 \end{bmatrix} :$$

$$\begin{bmatrix} 0,21 \\ 0,45 \\ 0,34 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3,08476 \\ 3,16556 \\ 3,07441 \end{bmatrix}$$

Untuk menguji konsistensi hierarki, dilakukan penghitungan Consistency Index (CI) lanjut dengan penghitungan Rasio Konsistensi/ Consistency Ratio (CR).

$$\begin{aligned}
 CI &= (\lambda_{\text{maks}} - n)/n-1 \\
 &= (((3,08476+3,16556+3,07441)/3) - 3) / 3-1 \\
 &= (3,11-3)/3-1 \\
 &= 0,05 \\
 CR &= CI/IR \\
 &= 0,05/0,58 \\
 &= 0,09
 \end{aligned}$$

Karena $CR \leq 0,1$ berarti preferensi responden adalah konsisten. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas berikut:

1. Pola Rekrutmen dengan nilai bobot 0,21 atau 21%
2. Diklat dengan nilai 0,45 atau 45%
3. Sistem remunerasi dengan nilai 0,34 atau 34%

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian didapat hasil pembobotan pada kriteria dan alternatif yang dirangkum dalam gambar 3 berikut:

**Gambar 3: Hierarki Hierarki
Manajemen Pilkada Kota Metro
Setelah Penelitian**



Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapat pembobotan kriteria dengan urutan sebagai berikut:

1. Partisipasi pemilih dengan bobot 0,32 atau 32%
2. Kualitas SDM dengan bobot 0,20 atau 20%,
3. Regulasi dengan bobot 0,15 atau 15%

4. Dukungan stakeholders dengan bobot 0,14 atau 14%
5. Ketersediaan anggaran dengan bobot 0,11 atau 11%
6. Sistem Informasi manajemen dengan bobot 0,08 atau 8%

Pembobotan tersebut menunjukkan kriteria partisipasi Pemilih menjadi kriteria dengan bobot tertinggi dengan nilai 32% diikuti oleh Kualitas SDM 20%, Regulasi 15%, Dukunhsn Stakeholders 14%, Ketersediaan Anggaran 11% dan Sistem Informasi Manajemen 8%. Sedangkan rasio konsistensi sebesar 0,09, sehingga matriks dinyatakan konsisten karena dibawah hasil uji rasio konsistensi dibawah $\leq 0,1$. Dengan demikian, matriks kriteria dapat menjadi dasar mengambil kesimpulan yang valid.

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan terbuka, responden berpendapat Partisipasi Pemilih menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh, sedangkan kriteria sistem informasi dianggap tidak terlalu berpengaruh oleh responden karena tidak banyak berdampak pada pelaksanaan Pilkada Kota Metro.

Partisipasi Pemilih dianggap paling penting dan sangat berpengaruh karena partisipasi pemilih merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi di sebuah negara. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen transformasi kedaulatan menjadi kewenangan. Warga yang memiliki kedaulatan, melalui pemilu memilih wakil atau orang yang akan duduk di badan eksekutif atau legislatif, yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan publik yang akan mengenai seluruh warga.

Selanjutnya karena kriteria partisipasi pemilih mendapat bobot tertinggi, pembahasan akan difokuskan kepada alternatif pada kriteria partisipasi pemilih. Berdasarkan hasil penelitian didapat pembobotan alternatif pada kriteria partisipasi pemilih sebagai berikut:

1. Kesukarelaan dengan nilai bobot 0,20 atau sebesar 20%
2. Dorongan / himbauan dengan nilai 0,35 atau sebesar 35%
3. Insentif dengan nilai 0,46 atau sebesar 46%

Hasil pembobotan menunjukkan alternatif Insentif menjadi alternatif dengan bobot tertinggi dengan nilai 46%, diikuti dorongan/himbau 35% dan kesukarelaan 20%. Sedangkan rasio konsistensi sebesar 0,09, sehingga matriks dinyatakan konsisten karena dibawah hasil uji rasio konsistensi dibawah $\leq 0,1$. Dengan demikian, matriks alternatif pada kriteria partisipasi pemilih dapat menjadi dasar mengambil kesimpulan yang valid.

Sedangkan berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan terbuka dengan responden untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU harus melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. KPU harus membuat terobosan baru agar Pilkada menjadi menarik dan nyaman serta mudah untuk diakses. Terobosan dapat berupa:
 - a. Menyederhanakan Surat Suara
 - b. Mempersingkat waktu mencoblos
 - c. Menaikkan honor petugas KPPS
 - d. Membatasi Syarat usia petugas KPPS
 - e. Memberikan layanan kesehatan gratis

2. KPU harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas.

Sosialisasi yang dilakukan adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah. Sosialisasi dapat dilakukan diberbagai tempat seperti sekolah, perguruan tinggi, tempat keramaian lainnya seperti pasar, taman dan lain-lain.

3. Memberikan ruang kepada pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam proses Pemilihan. Sebagai pemilih pemula, peran serta dalam Pemilu dan Pemilihan seperti terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, membantu sosialisasi Pemilu dan Pemilihan, membantu pendidikan politik bagi pemilih, memantau Pemilu dan Pemilihan, melakukan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu dan Pemilihan, menjadi peserta Pemilu dan Pemilihan
4. Melakukan dialog/diskusi publik dengan berbagai instansi terkait. Diskusi dapat dilakukan dalam forum formal maupun non formal. Pihak yang dapat dilibatkan dalam diskusi adalah tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, pelajar, pemangku kebijakan dan pihak-pihak terkait.
5. Memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat serta membangun ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat

6. Penguatan jejaring struktur mulai dari struktur terkecil pemerintahan, seperti RT, RW, Toga, Toma, Pamong, Kelurahan dan Kecamatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi manajemen Pilkada Kota Metro yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur realitas permasalahan yang dihadapi KPU kota Metro dalam evaluasi/ penilaian pelaksanaan manajemen Pilkada Kota Metro Tahun 2020 yang meliputi Kualitas SDM, Ketersediaan Anggaran, Sistem Informasi Manajemen (SIM), Regulasi, Dukungan Stakeholders dan Partisipasi Pemilih berjalan dengan baik. KPU Kota Metro menggunakan kriteria manajemen sebagai berikut: Faktor atau kriteria yang dianggap paling penting dalam Evaluasi Manajemen Pilkada Kota Metro adalah Partisipasi Pemilih yang sangat berpengaruh, sedangkan kriteria sistem informasi dianggap paling tidak penting dan tidak terlalu berpengaruh karena tidak banyak berdampak pada pelaksanaan Pilkada Kota Metro.
2. Perencanaan, Koordinasi, implementasi dan pengawasan telah dilakukan oleh KPU Kota Metro dengan baik dan tertib sesuai dengan tahapan Pilkada yang telah ditetapkan.
3. KPU Kota Metro menggunakan model Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Metro tahun 2020, yaitu kegiatan terencana

dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Saran

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan oleh KPU dalam mengevaluasi manajemen Pilkada Kota Metro, antara lain sebagai berikut:

1. KPU Kota Metro dapat berfokus pada aspek Partisipasi Pemilih serta ketiga alternatif pada kriteria partisipasi pemilih. Serta, KPU Kota Metro dapat meningkatkan sistem informasi kepada pemilih/masyarakat sehingga dapat berdampak pada pelaksanaan Pilkada Kota Metro selanjutnya.
2. Untuk meningkatkan tahapan Perencanaan, Koordinasi, implementasi dan pengawasan KPU Kota Metro dapat melibatkan pihak-pihak terkait atau *stakeholder* yang berperan dalam tahapan pilkada sebagai masukan, saran, sistem kontrol agar pilkada dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan tahapan Pilkada yang telah ditetapkan.
3. Model Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Metro tahun 2020 yang telah dilaksanakan harus terus ditingkatkan serta melibatkan semua aspek penyelenggaraan dalam pengujian dan pelibatannya. Agar hasil tahapan pilkada dapat berkualitas dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 4 (2023) No. 2
ISSN Cetak 2746-5551
ISSN Online 2746-556X

- Aditya Perdana dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Ani arifiani umar dkk. 2017. *Manajemen Pemilu : Mempersiapkan panitia pemilihan yang lebih mandiri, kompeten, dan berintegritas (Studi PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Temanggung Pemilu Legislatif Tahun 2014)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Daniri, Achmad, 2005, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: PT Triexs Trimacindo
- Kurnia, Sari Utami Dina. 2021. *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002*, Banten: Jurnal Pemilu dan Demokrasi VOL. 1, NO. 1, (2021), E-ISSN: 2797-0191, P-ISSN: 2797- 2607
<https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia>
- KPU Kota Cilegon. Cilegon. *Evaluasi Tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota kota cilegon tahun 2020 di era pandemi*. 2021
- Nur Agustyati, K. . (2020). Penataan jadwal keserentakan pemilu dan implikasinya terhadap manajemen pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 61–81.
<https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.241>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 *tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*
- P Tampubolon, R. (2019). Evaluasi manajemen penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dan implikasinya . *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 104–116.
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani Ahmad Beni. 2008. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Surbakti , dkk, 2011, Buku Serial
Demokrasi : Menjaga Kedaulatan
Pemilih, Jakarta : Kemitraan.
- Surbakti, Ramlan, 2016, Pidato Inagurasi
Anggota Baru Akademi Ilmu
Pengetahuan Politik
- Trisiana, Anita. 2014 "Optimalisasi
Belajar Mandiri Tata Pamong (Tinjauan
Kritis dan Pengembangan
Terhadap Peningkatan
Kualitas Sumber Daya
Manusia yang
Berkarakter)." Widya Wacana:
Jurnal Ilmiah 9.2
- Undang Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
- Wardani, Aulia Dwi. 2019. *Pengaruh
Kompetensi Sumber Daya
Manusia, Human
Relations Dan Motivasi
Berprestasi Terhadap Kinerja
Pegawai*. Diss. Universitas
Muhammadiyah Ponorogo.
- Wulansari, S. E. 2022. *Konflik
Kepentingan Dalam Seleksi
Calon Anggota Komisi*
167
- Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah
Tahun 2018*. Diss. Faculty of Social
and Political Science.
- Zamzam dkk. 2019. *Pembentukan Nilai-
Nilai Integritas Dan Profesional
Melalui Bimbingan
Teknis Oleh Kpu Kota Padang*
123Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Andalas
JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi:
Januari-Juni Tahun 2019
- Sumber Internet
- <https://COVID19.go.id/peta-sebaran>
diakses pada tanggal 7 Oktober
2022 pukul 19.36 WIB
- [https://news.detik.com/berita/d-
5177176/pemerintah-60-bakal-
calon-kepala-daerah-positif-
corona](https://news.detik.com/berita/d-5177176/pemerintah-60-bakal-calon-kepala-daerah-positif-corona) diakses pada tanggal 05
Oktober 2022 pukul 14.00 WIB
- [https://www.cnnindonesia.com/nasional/
20201005084506-32-
554330/tiga-calon-kepala-
daerah-meninggalterpapar-
COVID-19](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005084506-32-554330/tiga-calon-kepala-daerah-meninggalterpapar-COVID-19) diakses pada tanggal 6
Oktober 2022 Pukul 13.00 Wib
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_C
OVID-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19) di akses pada tanggal
07 Oktober 2022 pukul 15.00
WIB
- [https://nasional.kompas.com/read/2020/0
9/10/1 5313681/kpu-60-calon-
kepala-daerah-terpaparCOVID-
19](https://nasional.kompas.com/read/2020/09/10/15313681/kpu-60-calon-kepala-daerah-terpaparCOVID-19) diakses tanggal 5 Oktober
2022 pukul 21.00 Wib

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/
20201005084506-32-554330/tiga-
calon-kepaladaerah-meninggal-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005084506-32-554330/tiga-calon-kepaladaerah-meninggal-)

terpapar-COVID-19 diakses
tanggal 7 Oktober 2022 pukul
17.00 Wib